

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DALAM PEMBERDAYAAN UMKM BATIK SRIKANDI DI DESA SIBUAK KABUPATEN KAMPAR

Oleh : Halimah Tussakdiah

Pembimbing : Tito Handoko

Email : halimahtusskadya@gmail.com, tito.handoko@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The underdevelopment of micro, small and medium enterprises tends to be misunderstood by various parties. One of the problems that has caused the underdevelopment of small businesses so far is the government which substantially does not want to be serious in carrying out a strong to protect and side with the interests of small businesses. In this case, the role of the government is needed which is marked by the existence of law No.9 of 1995 concerning small business as the backbone and strengthening the structure of the national economy. In reality, there are still various kinds of problems faced by number of business actors in Kampar District, the number of which are quite large and still need to get encouragement and guidance, other problems that arise are the low quality of UMKM human resources, and the development of UMKM in Kampar district is still not optimal. Local governments have a strong enough role in advancing and developing small businesses in their regions. So this needs to be analyzed further regarding the efforts of the Kampar district government in empowering UMKM. The method used in this research is a descriptive method with a qualitative research type. The types of data in this research are primary data and secondary data. The data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis. The results of this study are several efforts from the Kampar district government in empowering srikandi batik UMKM in sibuak village, Kampar district. Including the implementation of entrepreneurship training which is held in order to improve the ability of UMKM actors in managing their UMKM businesses. Based on several related indicators in empowering UMKM, it can be concluded that the Kampar district government through the trade department, cooperatives and UMK has tried to maximize the empowerment of UMKM in accordance with good indicators, but in the rality it is still considered less than optimal due to the lack of public knowledge and also the limited scope that is far from the reach of the government so that is not comprehensive.

Keywords : Empowerment and development, UMKM.

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara (Salamah, 2001).

Dalam mencapai tujuan negara, pemerintah harus menjalankan fungsi, dimana pemerintah mempunyai 3 fungsi yang hakiki, yaitu fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Ketiga fungsi ini mempunyai keterkaitan satu sama lain (Salamah, 2001).

Saat ini Negara Indonesia tengah diguncang dengan maraknya krisis Pandemi Covid-19, dan dari krisis yang terjadi ini justru berdampak lebih besar daripada krisis ekonomi yang melanda pada tahun-tahun sebelumnya. Indonesia diprediksi mengalami pertumbuhan ekonomi yang merosot yaitu 0,5% dan jauh merosot dari prediksi yang telah dibuat pada awal tahun (Indonesia & Krisis, 2016).

Dalam hal ini, dibutuhkan adanya peran pemerintah yang ditandai dengan adanya Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang bertujuan antara lain untuk mewujudkan peran usaha kecil sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan

Pemerintah Nomor: 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan sebagai salah satu bentuk upaya penciptaan iklim usaha melalui kerjasama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar (Salamah, 2001). Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan berdasarkan dari TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) masing-masing dan PP RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam realitanya, masih terdapat berbagai macam masalah yang dihadapi sejumlah Pelaku Usaha di Kabupaten Kampar, hal tersebut seharusnya menjadi pendorong bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam memaksimalkan pemberdayaan UMKM untuk pencapaian kesejahteraan ekonomi rakyat dan kemandirian. Di Kabupaten Kampar sendiri jumlah UMKM cukup banyak dan masih perlu mendapatkan dorongan dan bimbingan, permasalahan yang timbul lainnya yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman UMKM, masih rendahnya daya saing produk UMKM, masih rendahnya kualitas SDM UMKM, kurang optimalnya pengembangan UMKM di Kabupaten Kampar. Kurang optimalnya pembinaan dan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terhadap UMKM dan masyarakat dapat dilihat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha yang dalam hal ini juga belum optimal dilaksanakan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta

kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh ; Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan juga masyarakat secara menyeluruh, yang dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan.

Pemerintah Daerah memiliki andil yang cukup kuat dalam memajukan dan mengembangkan usaha kecil menengah yang ada didaerahnya. Hal ini diperlukan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, maka Pemerintah Daerah sudah seharusnya dapat memberikan atau mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kampar juga telah berusaha untuk melakukan peningkatan potensi UMKM ditengah masa pandemi yang sedang berlangsung, pemerintah saat ini tidak hanya mendorong pertumbuhan UMKM-nya saja, tetapi pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tantangan yang terjadi saat ini yaitu dengan melalui pendampingan, kemudahan akses modal dan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi. Seperti yang penulis kutip dari [@kominfosandi.kamparkab.go.id](https://kominfosandi.kamparkab.go.id) yang memuat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah terkait dengan peningkatan UMKM yaitu dengan mengucurkan dana anggaran sebesar 123 triliun dengan tujuan utamanya yaitu untuk menopang UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar juga menjamin bagi pelaku UMKM dalam hal kemudahan akses modal dan juga pelatihan yang dalam hal ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pelaku UMKM. Tidak hanya itu saja, Pemerintah Kabupaten Kampar juga terus fokus dalam meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang dalam hal ini juga dibarengi dengan

peningkatan kualitas pengembangan kewirausahaan, ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menggali potensi dan kompetensi sumber daya manusia di Kabupaten Kampar dalam mendukung penyerapan lapangan kerja.

Berdasarkan fenomena diatas, dibutuhkan adanya upaya serta usaha dari Pemerintah Kabupaten Kampar terkait dengan Pemberdayaan UMKM batik srikandi ataupun UMKM lainnya yang ada di Kabupaten Kampar agar para pelaku usaha masih tetap bisa berjalan dan berkembang. Untuk meneliti lebih lanjut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **“Upaya Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan UMKM Batik Srikandi Di Desa Sibuk Kabupaten Kampar”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena tersebut, maka penulis memiliki pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pemberdayaan UMKM Batik Srikandi yang ada di Desa Sibuk Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar?
- b. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)?

2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana upaya Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pemberdayaan UMKM Batik masyarakat Desa Sibuk Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat Pemerintah

3. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai referensi dan wawasan yang saling melengkapi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam menghadapi tantangan yang akan datang terkait dengan pemberdayaan UMKM.
- 2) Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir penulis melalui karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang penulis dapat selama perkuliahan.
- 3) Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di lapangan dan menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan perkuliahan dalam mencapai gelar strata satu.
- 2) Adapun kegunaan penelitian ini adalah diharapkan berguna sebagai informasi dan bahan acuan terkait tentang kebijakan pemerintahan.
- 3) Sebagai bahan informasi bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sama.

4. Tinjauan Pustaka

a. Studi Terdahulu

- 1) Jurnal yang berjudul “Penerapan Bauran Pemasaran dan *Political Will*

pemberdayaan UMKM.

Pemerintah Pada Industri Batik Bomba Di Kota Palu”.

- 2) Jurnal yang berjudul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Kudus”. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
- 3) Jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoang Barat Kabupaten Minahasa”.
- 4) Jurnal yang berjudul “Pengembangan *Political Will* Pemerintah Desa Memberdayakan Petani Aren di Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar”.
- 5) Jurnal yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi”.

b. Kerangka Teori

1) Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut (Suharto, 2014: 59), adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau juga mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu yang bersifat fisik, ekonomi,

maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan juga mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

konsep pemberdayaan merupakan upaya untuk mendorong individu maupun kelompok untuk mampu mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan hidup, maupun dalam pemecahan masalah.

Pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan, yang dalam hal ini berkaitan dengan pemberdayaan UMKM seperti yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat yang secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga para Pelaku Usaha dapat berdaya, sehingga diharapkan lahirnya kemandirian dan pertumbuhan ekonomi lokal di masyarakat.

2) Tujuan Pemberdayaan

Dalam hal ini semua konsep pemberdayaan itu pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mandiri. Tujuan pemberdayaan menurut Suharto yaitu menunjuk

pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial: yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan UMKM

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kampar telah berusaha dan berupaya untuk melakukan peningkatan potensi UMKM yang ada di Kabupaten Kampar. Oleh sebab itu, yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tidak hanya mendorong pertumbuhan UMKM-nya saja, tetapi pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tantangan yang terjadi saat ini beberapa diantaranya yaitu dengan melalui pendampingan pelaku usaha, memberikan kemudahan akses modal dan juga memberikan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi bagi pelaku usaha.

2. Pemberdayaan UMKM Melalui Pemberian Dana Bantuan Modal Bagi Para Pelaku UMKM

Pemberdayaan UMKM sendiri itu juga sudah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, maka dari itu Pemerintah Daerah dalam hal ini harus memperhatikan seluruh UMKM yang ada di daerahnya masing-masing sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dalam menjalankan Undang-

undang yang sudah diatur dan juga sudah disepakati bersama. Dalam Bab II pasal 4 dan juga dalam pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2008 yaitu tentang UMKM dalam mengembangkan sebuah daerah tentu kita harus mengetahui bagaimana karakteristik dan juga potensi yang ada di daerah tersebut, maka dari itu dalam hal ini perlu adanya identifikasi guna untuk mengetahui itu semua, sehingga potensi yang ada dapat dimaksimalkan dan juga dapat dilestarikan.

Modal menjadi salah satu unsur terpenting di dalam dunia usaha. Manajemen permodalan yang baik sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha untuk mempertahankan dan juga mengembangkan usaha yang dimilikinya.

UMKM batik merupakan salah satu usaha yang membutuhkan manajemen atau pengelolaan modal yang baik. Hal itu disebabkan karena persaingan usaha yang cukup kompetitif dan juga mahalnya bahan baku pembuatan batik. Berdasarkan permasalahan permodalan tersebut, maka pemerintah daerah kabupaten Kampar melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMK sudah memberikan bantuan dana atau bantuan permodalan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ada di Kabupaten Kampar namun belum merata.

3. Adanya Pendampingan dan Pelatihan Khusus Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK Untuk Pelaku UMKM

Pembinaan terhadap usaha kecil di Indonesia dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 14 yang menjelaskan bahwa Pemerintah, dunia usaha dan juga masyarakat melakukan pembinaan dan

pengembangan Usaha kecil dalam bidang : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber daya manusia, dan Teknologi. Selanjutnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 15 menjelaskan secara rinci mengenai pembinaan dan pengembangan dalam produksi dan pengolahan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan UMKM yaitu dengan melakukan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan yang dalam hal ini merupakan salah satu alternatif dalam peningkatan kewirausahaan terutama dalam pencapaian dan juga peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan ini diselenggarakan guna untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usaha UMKM nya. Hal ini juga diharapkan akan berdampak pada peningkatan hasil usaha yang optimal sehingga terwujud UMKM yang tangguh dan juga mandiri.



Gambar 1

Pelatihan kewirausahaan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kampar

Pemerintah Kabupaten Kampar juga berupaya untuk membangkitkan jiwa kewirausahaan masyarakat hal ini dapat dilihat dari sudah adanya dilakukan pelatihan-pelatihan membuat, hal ini guna untuk mendorong hasil produksi dan juga kualitas produksi para pelaku

UMKM tersebut. Pemberian pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pelaku usaha batik dalam meningkatkan penguasaan bidang-bidang manajerial dan teknologi yang baik. Namun dalam hal ini dirasa belum maksimal dan hanya terbatas pada kelompok masyarakat tertentu. Juga sudah adanya pelatihan kelembagaan guna untuk meningkatkan kemandirian dari para pelaku UMKM dalam menjalankan dan juga mengurus internal dari usahanya, namun juga terkadang masih ada pelaku UMKM yang belum menerapkan hasil dari pelatihan yang ada.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Melakukan Penyelenggaraan Pemasaran dan Promosi Produk UMKM

Permasalahan di bidang pemasaran merupakan kendala umum dan utama yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM, salah satunya tak menutup kemungkinan dengan pemasaran kain batik di Desa Sibuk yang memiliki beberapa kendala dalam hal pemasaran yang dialami oleh para pelaku usaha, kendala ini meliputi akses yang cukup jauh dari kota, infrastruktur yang kurang memadai dan kurang didukungnya tempat usaha untuk memasarkan hasil produk.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa belum optimalnya pembangunan prasarana dan juga pengoptimalan prasarana untuk mendukung kegiatan pertumbuhan UMKM. Terutama masih belum adanya pemberian sarana prasarana pemasaran yang secara nyata kepada pelaku UMKM terutama dalam bidang pemasaran, yaitu masih hanya seputar pelatihan memasarkan online dan dengan pameran-pameran yang diadakan, dalam hal ini contohnya dalam memasarkan online batik srikandi sendiri

eksis dalam media sosial seperti salah satunya batik srikandi memiliki akun instagram sendiri. Terkait dengan pemasaran pameran, batik srikandi hanya beberapa kali melakukan promosi produk salah satunya yang dilakukan yaitu di Mall Pekanbaru yang ditaja langsung oleh Duta Remaja Riau, dan juga penyelenggaraan promosi UMKM dalam acara HUT Kabupaten Kampar.



Gambar 2

Penyelenggaraan Promosi UMKM Dalam Acara HUT Kab.Kampar

Dari data diatas mengungkapkan bahwa pengusaha batik di Desa Sibuk harus bisa mandiri dalam menangkap peluang dan juga merencanakan strategi agar bisa bersaing dengan produk lain dan bisa menarik konsumen, sehingga usaha batik mereka bisa menjadi usaha besar dan berkembang dan dengan cara ini diharapkan usaha UMKM-nya semakin dikenal oleh banyak orang.

5. Faktor Penghambat Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terbatas juga merupakan sebagai faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM, karena secara umum UMKM yang berkembang di beberapa daerah merupakan sebagian besar usaha kecil yang tumbuh secara tradisional ataupun usaha keluarga yang turun temurun.

Keterbatasan sumber daya manusia dalam usaha baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya secara tidak langsung mempengaruhi keterbatasan informasi dan juga memacu rendahnya kreativitas.

b. Teknologi

Dalam hal ini teknologi juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM, karena teknologi diperlukan guna untuk meningkatkan daya saing UMKM, baik itu penggunaan teknologi pada kegiatan produksi maupun teknologi informasi pada kegiatan promosi dan pemasaran. Penggunaan media sosial yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan sangat baik untuk mempromosikan produk mereka tetapi justru menimbulkan kendala tersendiri. Terutama dalam proses pemasaran, beberapa pelaku usaha pernah mencoba menggunakan media online tetapi hal itu tidak berlangsung lama, karena penggunaannya yang dirasa rumit, dan juga rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola teknologi informasi tersebut, dari pengamatan penulis sendiri hal ini bisa dikarenakan oleh faktor usia dari para pelaku usaha.

c. Modal

Dalam hal ini dunia usaha modal yang dimaksud yaitu mencakup kekayaan yang berasal dari harta kepemilikan pribadi ataupun bantuan dari pihak-pihak yang terkait baik berupa uang maupun peralatan usaha yang diperlukan. Beberapa pemilik usaha ada yang menggunakan tabungan sendiri untuk menambah modal, ada

pula beberapa pemilik usaha yang melakukan pinjaman kepada lembaga-lembaga keuangan guna untuk menambah modal terkait dalam pengembangan usaha mereka. Seperti wawancara langsung dengan pelaku usaha di batik srikandi Ibu Wuliyati yang mengatakan bahwa *“kami menggunakan modal usaha sendiri, tabungan masing-masing paling dari keuntungan itu dikelola lagi agar bisa membeli bahan-bahan batik yang dibelinya dari pulau jawa”*.

Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya berupa bantuan tambahan modal usaha guna untuk mengembangkan usaha mereka.

d. Inovasi

Salah satu karakteristik dari seorang wirausaha adalah inovatif, dalam hal ini berupa inovasi, kreativitas dan ide-ide menarik lainnya sangat diperlukan untuk mempertahankan usaha dan juga meningkatkan daya saing. Keadaan pasar yang semakin sepi dan juga daya beli konsumen yang menurun dalam hal ini sangat membutuhkan inovasi pada produk-produk usaha mereka. Hambatan ini didukung dengan keadaan sumber daya manusia yang belum dapat menyajikan ide-ide kreatif mereka guna meningkatkan daya saing dan daya beli konsumen. Oleh sebab itu diperlukan tingkat kreativitas masyarakat agar mampu berdaya saing tinggi.

III. KESIMPULAN

1. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan merupakan salah satu alternatif dalam peningkatan kewirausahaan terutama dalam

pencapaian dan juga peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan ini diselenggarakan guna untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usaha UMKM nya. Selanjutnya dalam bidang pemasaran dapat dikatakan bahwa belum optimalnya pembangunan prasarana dan juga pengoptimalan prasarana untuk mendongkrak kegiatan pertumbuhan UMKM. Terutama masih belum adanya pemberian sarana prasarana pemasaran yang secara nyata kepada pelaku UMKM terutama dalam bidang pemasaran. Berdasarkan beberapa indikator terkait dalam pemberdayaan UMKM, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar sendiri melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMK sudah berupaya untuk memaksimalkan pemberdayaan UMKM sesuai dengan indikator yang baik, namun pada realitasnya dirasa masih kurang optimal dan merata karena masih ada beberapa para pelaku UMKM yang belum mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah dikarenakan kurangnya pengetahuan atau juga dikarenakan terbatasnya ruang lingkup dan jauh dari jangkauan pemerintah, dan juga masih terdapat adanya beberapa pelaku UMKM yang merasa fasilitas yang sudah diberikan itu masih kurang optimal.

2. Persoalan yang kemudian menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, permasalahan teknologi, masalah permodalan, dan juga inovasi. Permasalahan ini tidak semua sama dihadapi oleh para pelaku usaha, karena mereka memiliki permasalahan masing-masing sesuai dengan jenis usaha maupun ruang lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin. (2013). *Metode Penelitian*. Alaf Riau.
- Ghony, M. D. (2016). Jenis penelitian deskriptif. In *Metode penelitian kualitatif* (p. 13). Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Indonesia, D. I., & Krisis, K. (2016). *No Title*. 1(2), 377–388.
- Krisis, A., Global, E., & Dampak, D. (2020). *AkMen AkMen*. 17, 90–98.
- Lumempow, K. M., & Sambiran, S. (2021). *Jurnal governance*. 1(1), 1–8.
- Machfoedz, Mas'ud. 2011. *Kewirausahaan Metode, Manajemen, dan Implementasi*. Yogyakarta
- Mada, U. G. (2001). *Mengatasi krisis moneter melalui penguatan ekonomi rakyat*. 16(2), 97–110.
- Moleong. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Natasya, V., & Hardiningsih, P. (2021). *Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi*. 5(1), 141–148. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.317>
- Program, M., Magister, S., Pascasarjana, M., & Tadulako, U. (n.d.). *Penerapan bauran pemasaran dan political will pemerintah pada industri batik bomba di kota palu*. 100–110.
- Salamah, L. (2001). *Lingkaran krisis ekonomi indonesia*. 2, 65–76.
- Siyoto, S. &. (2015). *Pendekatan penelitian. In Dasar Metodologi Penelitian* (p. 28). Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Tampongangoy, D. L. (2008). *Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan UKM Di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah Kota*

Manado Naritza Mirlithia Karauwan Alden Laloma. 00.

Tarmidi, L. T. (1998). *Krisis moneter indonesia : sebab, dampak, peran imf dan saran **). 1–25.

Usman, H. &. (2014). *Teknik pengumpulan data. In Metodologi Penelitian Sosial* (p. 52). Jakarta: Bumi Aksara

Yusri, A. (2019). *PENGEMBANGAN POLITICAL WILL PEMERINTAH DESA*. 117–128.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah

Media Massa

Kamil, Irfan. 2020. “Suspek covid-19”. (Online), Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/12/15472701/update-12-november-ada-56868-suspek-covid-19-di-indonesia?page=all>. Diakses 29 September 2021, Pukul 20.30 Wib.

Supardi, Nov 3, 2020. “Pembkab Kampar Terus Bina UMKM agar Eksis di Tengah Pandemi Covid-19 dengan Pelatihan Kewirausahaan”. (Online), <https://kominfosandi.kamparkab.go.id>. Diakses 29 September 2021, Pukul 20.35 Wib.

Antara Riau. 7 Juli 2020. “Imbas Covid-19, pengrajin batik keluhkan kekurangan modal”. (Online), <https://riau.antaranews.com>. Diakses 30 September 2021, Pukul 09.30 Wib.